

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

#### **Sehubungan dengan posisi dan peran Pimpinan TI pada perusahaan Tbk.**

1. Menurut penulis mungkin dengan semakin kecilnya jenjang pelaporan Pimpinan TI dengan Direktur Utama pada suatu perusahaan Tbk bisa dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik dan bisa memperoleh penerjemahan strategi bisnis terhadap kebutuhan TI antara Pimpinan TI dengan Direktur Utama dalam hal melakukan penerapan TI pada perusahaan secara *comprehensive*.
2. Adanya aturan UU di Indonesia sebagai faktor penekan terhadap fungsi Dewan Direksi perusahaan.
3. Pelaporan Pimpinan TI kepada Direktur Keuangan di perusahaan Tbk terkait dengan mendukung pelaksanaan pelaporan keuangan terhadap Regulator.

#### **Sehubungan dengan komite terkait TI dalam perusahaan Tbk.**

1. Sebagian besar perusahaan Tbk sudah menerapkan IT Steering Committee pada perusahaannya.
2. Masih sebagian kecil perusahaan Tbk di Indonesia menerapkan *IT Project Steering Committee*.
3. *IT Strategy Committee* belum diterapkan pada perusahaan Tbk.
4. Komite Audit wajib diterapkan pada suatu perusahaan Tbk.

5. Sebagian besar perusahaan Tbk telah memiliki komite investasi.
6. Adanya korelasi positif antara komite resiko dengan komite audit yang dimiliki perusahaan Tbk.
7. Sebagian besar perusahaan Tbk di industri perbankan memiliki dan menerapkan PMO.

### **Sehubungan dengan komite terkait TI dalam perusahaan Tbk.**

1. Pengambilan keputusan TI perusahaan Tbk di Indonesia masih berdasarkan Business Monarchy.
2. Input atau masukan-masukan secara Feudal yang ditemukan pada IT Principle, Business Application Needs dan IT Investment dikarenakan secara tak langsung harus berhubungan dengan bisnis unit terkait yang ada pada perusahaan tersebut.
3. Input atau masukan-masukan terhadap IT Arsitektur dan IT Infrastruktur adalah sebagian besar ditentukan oleh IT Monarchy.

## **5.2 Saran**

Selain adanya kelebihan diatas, maka berikut saran untuk penelitian selanjutnya yang akan dikembangkan.

- Penelitian yang dilakukan penulis ini masih masih bisa dikembangkan pada penelitian selanjutnya dimana secara spesifik dilakukan secara khusus dengan adanya penelitian yang nantinya menggunakan lebih banyak lagi sample penelitian perusahaan terbuka di Indonesia, harapan penulis dengan lebih kayanya multi industri yang saat ini ada di Indonesia dapat diperoleh pola-pola IT Governance yang lainnya.

- Aturan secara langsung dari Bapepam menurut penulis diperlukan selayaknya seperti aturan yang sudah diterapkan pada Perbankan (Peraturan Bank Indonesia) yang secara langsung mengatur mengenai teknologi informasi secara komprehensif. Hal ini mengingat perusahaan terbuka adalah salah satu sektor yang selain berhubungan dengan kompetisi pasar bebas di Indonesia, dan juga berhubungan dengan keakuratan, transparansi serta keterbukaan informasi yang ada dari setiap perusahaan terbuka (Tbk) agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pemegang saham / modal dari perusahaan terbuka tersebut.
- Selain adanya aturan di Indonesia yang mengatur masalah peran dan tanggung jawab dewan direksi pada suatu perusahaan terbuka, ada baiknya di Indonesia mungkin bisa diterapkan pengaturan TI yang dapat dilakukan secara *decentralized* selain membuat fungsi dari masing-masing komponen dari organisasi pada perusahaan terbuka bertindak sebagai Strategic Business Unit (SBU) agar dapat mempersiapkan perusahaan terbuka tersebut dalam menuju kompetisi internasional.

Akhirnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi penerapan tata kelola TI (IT Governance) pada perusahaan-perusahaan Tbk di Indonesia.